

## TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN LAYANAN PERPUSTAKAAN YANG INKLUSIF : STUDI KASUS DI PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

Dian Utami, Perpustakaan Nasional RI  
Wahyu Deni Prasetyo, Perpustakaan Nasional RI

### Abstrak

*Perpustakaan mempunyai peran strategis sebagai lembaga belajar sepanjang hayat yang layanannya dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengembangan potensi diri. Perpustakaan juga memiliki peran sebagai leading sector dalam menciptakan masyarakat yang literat. Masyarakat literat pada satu sisi dan pembangunan ekonomi-masyarakat pada sisi lainnya merupakan dua buah variabel yang saling berpengaruh dalam peningkatan kualitas hidup dan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjalin kerjasama dengan Perpustakaan Nasional untuk menguatkan literasi masyarakat melalui perpustakaan dengan mentransformasikan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah suatu transformasi perpustakaan yang melayani kebutuhan informasi kepada seluruh pemustaka dengan tidak terbatas kepada lapisan golongan sosial masyarakat. Perpustakaan berbasis inklusi sosial juga berkomitmen pada pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat dengan informasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan menstimulan peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan informasi yang ada di Perpustakaan. Artikel ini membahas transformasi yang dilakukan oleh Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau guna mewujudkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.*

**Kata kunci:** Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Penguatan Perpustakaan, Penguatan Masyarakat

### Abstract

*Library has a strategic role as a lifelong education whose can optimizing the services for all of people to developing personal potential. The library also has a role as a leading sector to creating a literate society. Literate society in one side and an economic development in another side are two related variables. The regional government of Pulang Pisau Regency has collaborate with the National Library of Indonesia to reinforce the library by transforming library services based on social inclusion. Social inclusion based library are a library transformation that serves the information needs of all of the visitors. Social inclusion based library are also committed to meet the information needs of people with the information that can improve cognitive abilities and stimulating welfare improvement with library resources. This article discusses the transformation made by Pulau pisang regency public library to realize library services based on social inclusion.*

**Keywords :** Library based on social inclusion, Library reinforcement, Community reinforcement

## Pendahuluan

Perlahan paradigma perpustakaan mulai mengalami pergeseran dari yang awalnya sebagai lembaga tempat menyimpan buku menjadi lembaga strategis yang berperan dalam mengiringi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengembangan SDM dalam rangka mempersiapkan manusia yang unggul menjadi salah satu kata kunci dalam keberhasilan pembangunan nasional. Selain menyiapkan SDM yang unggul, pemanfaatan sumberdaya informasi yang ada di perpustakaan dapat diarahkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dengan menyediakan informasi-informasi yang bersifat stimulan maupun menambah kemampuan kognitif masyarakat dalam meningkatkan ekonomi. Perpustakaan menjadi ruang terbuka untuk seluruh golongan masyarakat dari berbagai usia untuk belajar hingga mengimplementasikan informasi yang ada di dalam perpustakaan menjadi pengetahuan maupun keahlian. Transformasi perpustakaan ini dikenal dengan istilah perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan Umum pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pulang Pisau melakukan transformasi layanan perpustakannya untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang inklusif dalam rangka pengembangan SDM masyarakat melalui penguatan literasi. Proses transformasi tersebut sudah mulai dirintis sejak tahun 2018 dengan bekerjasama Perpustakaan Nasional sebagai lembaga yang membina seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia. Perpustakaan umum daerah Kabupaten Pulang Pisau memiliki komitmen yang tinggi untuk bertransformasi guna menghadirkan jasa layanan yang inklusif kepada seluruh masyarakat. Transformasi ini dinamakan dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

### Definisi Inklusi Sosial

Untuk mendapatkan definisi inklusi sosial, dapat dimulai dengan cara mengambil definisi dari term eksklusif sosial karena dua term tersebut merupakan *counterpart* antara satu dengan yang lainnya. Rawal (2008) dengan mengutip P. Francis mendefinisikan eksklusif sosial sebagai suatu konsep yang mencoba membatasi akses sebagian kelompok sosial atau pengucilan dengan perampiasan hak dalam bersosial. Eksklusif sosial diartikan sebagai pembatasan hak seseorang dalam hubungan sosial masyarakat di mana seseorang itu tinggal. Eksklusif sosial memiliki term pembatasan, merujuk pada definisi tersebut maka inklusi sosial memiliki term penyeteraan hak akses yang sama kepada seluruh kelompok sosial masyarakat. Fourie (2007) mengatakan bahwa "*Social inclusion refers to all efforts and policies to promote equality of opportunity to people from all*

*circumstances and from all socially excluded categories.*" Wijayanti (2019) mendefinisikan inklusi sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka dengan mengikutsertakan semua masyarakat dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, maupun budaya. Perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat didefinisikan sebagai perpustakaan yang menawarkan jasa layanan informasi yang terbuka kepada seluruh masyarakat dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, maupun budaya untuk mengembangkan potensi diri untuk peningkatan ekonomi. Perpustakaan berperan sentral sebagai penghubung informasi dengan masyarakat bahkan dapat berperan sebagai wahana yang nyaman untuk mengembangkan informasi menjadi pengetahuan yang bersifat stimulan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.

Perpustakaan haruslah berbenah untuk tetap dapat menunjukkan eksistensi lembaga nya di tengah masyarakat dan mentransformasikan layanan perpustakannya berbasiskan inklusi sosial. Payung hukum pelaksanaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ada pada Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pada bab 2 pasal 5 yang secara eksplisit menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Konsep layanan perpustakaan berbasiskan inklusi sosial sejalan dengan apa yang diungkapkan dalam IFLA *Multicultural Library Manifesto* (2008) yang menyebutkan bahwa perpustakaan dalam perannya menghadapi masyarakat global, jasa layanan perpustakaan harus dapat melayani seluruh anggota kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pulang Pisau menjadi salah satu kabupaten dari 60 kabupaten di 21 provinsi yang memperoleh program Transformasi Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial. Pada tahun 2019 program tersebut diperluas jangkauannya kepada masyarakat ke 5 (lima) perpustakaan desa meliputi Desa Mantaren I, Desa Mantaren II, Desa Anjir Pulang Pisau, Desa Hanjak Maju, dan Desa Henda. Perpustakaan-perpustakaan di desa tersebut memperoleh bantuan buku, perangkat komputer dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bimbingan teknis dan pendampingan secara intensif. Perpustakaan di dorong untuk meningkatkan layanan komputer dan internet, melakukan advokasi dengan pihak lain untuk mendapatkan dukungan, serta

menyelenggarakan aneka kegiatan untuk menarik minat masyarakat untuk mencintai perpustakaan sekaligus memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat. Pembangunan dengan penguatan lembaga perpustakaan sejalan dengan paradigma baru arah pembangunan Indonesia yang tidak hanya bertumpu pada peningkatan ekonomi semata namun juga berpihak kepada aspek sosial. Pendekatan pembangunan ini disebut juga dengan pembangunan inklusif. Tujuan dari pembangunan inklusif adalah menjamin manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Pembangunan inklusif mendorong semua kelompok masyarakat untuk berkontribusi dalam menciptakan peluang, manfaat, dan partisipasi aktif dalam memajukan perekonomian. Pembangunan inklusif menjadi agenda pembangunan utama pada pemerintahan Presiden Indonesia ke-7, Ir. Joko Widodo. Artikel ini membahas transformasi yang dilakukan oleh perpustakaan umum daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam mewujudkan layanan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial.

### Makerspace Di Perpustakaan

Secara sosiologis, keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari tatanan masyarakat. Perpustakaan harus beranjak dari paradigma lama sebagai gudang penyimpanan buku dengan bertransformasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Layanan perpustakaan tidak hanya berorientasi kepada manajemen dan pengembangan koleksi-koleksi buku, tetapi harus menyentuh aspek korelasi ekstensialnya dengan melibatkan masyarakat untuk secara

aktif mendayagunakan perpustakaan. Selain menyediakan informasi, perpustakaan juga harus dapat menyediakan tempat di mana setiap orang yang memanfaatkan jasa perpustakaan dapat saling berinteraksi sosial dan juga mengembangkan ide kreatifitasnya di dalam perpustakaan. Konsep ini dikenal juga dengan konsep makerspace di perpustakaan. Alyssa Pisarski (2014 :13) dalam makalahnya yang berjudul *Finding a place for tween : Makerspace and libraries* menuliskan

*“Makerspace consist of a community af makers that come together to dreate by sharing tools skills, and knowledge – creating a place to learn a new skill to become a creator, to connect with a community and build a firendships, or to gain access to specialized equipment.”*

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa makerspace terdiri dari sekelompok komunitas sosial masyarakat yang datang secara bersama-sama untuk saling berbagi keahlian dan ilmu pengetahuan dan menjadikan perpustakaan menjadi sebuah tempat yang mengakomodir kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan transformasi berbasis inklusi sosial, perpustakaan Umum Daerah Pulang Pisau menjadi tempat untuk masyarakat untuk saling berinteraksi dan bertukar informasi untuk mengembangkan potensi masyarakat. Perpustakaan umum daerah Kabupaten Pulang Pisau memanfaatkan ruang multimedia yang tersedia untuk menjadi sarana belajar bersama pengenalan komputer dasar, pelatihan penggunaan program microsoft office dan internet dasar kepada masyarakat. Ruang multimedia yang berisi 10 komputer dan 2 buah laptop digunakan untuk pelatihan 4 hari dalam seminggu dengan 15 kali pertemuan. Seluruh masyarakat yang tidak terbatas oleh golongan sosial dan usia dapat mengikuti kelas pelatihan yang dibagi menjadi 5 kelas setiap harinya.



Gambar 1. Pelatihan komputer dan internet dasar di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Dengan pelatihan komputer dan internet dasar, perpustakaan membuka ruang untuk masyarakat dalam mengembangkan kemampuan dengan mengimplementasikan langsung keterampilan yang bersumber dari sumberdaya informasi yang tersedia di rak-rak koleksi. Selain kegiatan pelatihan komputer dan internet dasar, kegiatan-kegiatan lain yang memanfaatkan perpustakaan diantaranya adalah Kelas berbagi, belajar mewarnai di perpustakaan, Kelas Berbagi, Belajar bahasa asing di perpustakaan, Belajar bersama membuat video pendek di

perpustakaan. Dalam kaitannya dengan makerspace di perpustakaan, harus dipertajam lagi pengadaan subjek koleksi yang menunjang kegiatan-kegiatan makerspace. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan makerspace di perpustakaan menjadi jalan untuk menguatkan kondisi sosial dan menegaskan eksistensi perpustakaan di tengah masyarakat. Perpustakaan berperean sebagai ruang publik tempat berkumpulnya masyarakat untuk mencari informasi dan mengimplementasikan informasi tersebut untuk peningkatan kompetensi diri.



Gambar 2. Kelas Berbagi, belajar bahasa asing (untuk pemula) di perpustakaan

Tren layanan perpustakaan sudah berubah, layanan perpustakaan bukan hanya sekadar layanan membaca koleksi yang mengharuskan pemustaka untuk hening, perpustakaan menjadi lembaga yang menyediakan ruang untuk saling bersosialisasi, belajar dan bertukar informasi. Menurut Houston (2013), Ide awal untuk mengintegrasikan makerspace sebagai sebuah layanan perpustakaan bermula dari para pustakawan di perpustakaan sekolah yang ingin menghubungkan antara sumber daya yang ada di perpustakaan dengan proses pembelajaran. Makerspace dianggap sebagai jalan lain yang dapat mewujudkan iklim pembelajaran yang kolaboratif dan inovatif. Selain makerspace di perpustakaan, guna mewujudkan layanan perpustakaan yang inklusif, perpustakaan berbasis inklusi sosial juga dituntut untuk dapat lebih menjangkau masyarakat. Perpustakaan umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pulang Pisau melakukan beberapa

kegiatan dalam rangka perluasan hak akses masyarakat serta melakukan bekerjasama dengan stakeholder terkait.

### Bergerak Melayani

Pemerataan hak akses jasa layanan perpustakaan merupakan salah satu kata kunci untuk dapat mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ekstensifikasi jasa layanan perpustakaan diperlukan guna menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk dapat datang langsung ke lokasi gedung layanan perpustakaan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk melakukan ekstensifikasi jasa layanan perpustakaan dalam usaha untuk menjangkau masyarakat adalah pemanfaatan layanan mobil perpustakaan keliling, membina perpustakaan desa, dan mengadakan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) untuk

membentuk pondok baca polair di bahaur beserta penyediaan buku perpustakaan pada armada kapal melek literasi.

Perpustakaan keliling menjadi salah satu jenis layanan yang diadakan oleh Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk lebih mendekatkan buku dengan masyarakat dengan menggunakan sarana Mobil Perpustakaan Keliling (MPK). Layanan perpustakaan keliling yang diadakan oleh Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau di tujukan untuk siswa sekolah guna menumbuhkan kegemaran membaca sejak dini. Siswa dapat membaca koleksi di tempat ataupun meminjam buku dan membawa pulang dengan tenggat waktu yang ditentukan. Layanan perpustakaan melalui MPK yang diadakan tidak pernah sepi dari peminatnya dan siswa-siswa antusias untuk memanfaatkan buku yang dilayankan. Tujuan Perpustakaan Keliling menurut Basuki (1994) yaitu pertama, memperluas layanan perpustakaan sampai kepada masyarakat yang tidak terjangkau perpustakaan menetap. Kedua, melayani masyarakat karena kondisi tertentu tidak dapat mencapai perpustakaan menetap. Ketiga, memasyarakatkan perpustakaan dan meningkatkan minat baca.

Perpustakaan keliling memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan hak akses jasa layanan perpustakaan oleh seluruh masyarakat. Jasa layanan perpustakaan yang ditawarkan oleh perpustakaan keliling pada dasarnya bersifat terbuka dan demokratis karena semua lapisan sosial berhak untuk mengakses dan memanfaatkan informasi yang ada pada perpustakaan keliling. Yang perlu mendapatkan perhatian sebelum mobil perpustakaan keliling berangkat menuju lokasi sasaran layanan adalah subjek dari koleksi bahan perpustakaan yang akan dilayankan haruslah tepat sasaran dengan kebutuhan informasi masyarakat yang dituju oleh MPK. Selain menggunakan MPK, Perpustakaan umum daerah Kabupaten Pulang Pisau juga membangun jejaring kerjasama dengan stakeholder lain untuk mendekatkan jasa layanannya. Sinergi antar stakeholder menjadi salah satu elemen yang diperlukan untuk membangun perpustakaan berbasis inklusi sosial

yang bermuara kepada tujuan membangun masyarakat yang literat.

### Stakeholder Partnership

Dalam mewujudkan layanan perpustakaan yang inklusif kepada seluruh masyarakat maka diperlukan kerjasama antar stakeholder. Dalam mewujudkan layanan perpustakaan yang inklusif kepada seluruh masyarakat, tentu diperlukan peran dari satu stakeholder namun kolaborasi atau kerjasama dari para stakeholder. Kerjasama antar stakeholder atau stakeholder partnership diperlukan untuk memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki oleh perpustakaan. Stakeholder partnership atau kolaborasi kerjasama perpustakaan, menjadi salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh perpustakaan. Perpustakaan umum daerah Kabupaten Pulang Pisau telah, sedang, dan akan terus menjalin kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk mencapai tujuan pemerataan hak akses jasa layanan perpustakaan kepada seluruh masyarakat. Yang dimaksud dengan stakeholder dalam pembahasan ini mencakup lembaga maupun perorangan yang memungkinkan bekerjasama dengan perpustakaan.

Dalam rangka memberikan jasa layanan perpustakaan yang lebih menjangkau masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjalin kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah (Ditpolair Polda) Kalimantan Tengah untuk penyediaan buku perpustakaan pada armada kapal melek huruf dan pondok baca di pelabuhan Bahaur. Melalui kerjasama dengan ditpolair polda Kalimantan Tengah, layanan perpustakaan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar pelabuhan. Selain itu, jasa layanan perpustakaan dapat dirasakan oleh masyarakat setiap kali Ditpolair Polda Kalteng melakukan patroli ke daerah pesisir maupun ke pedalaman. Dengan saling bersinergi, diharapkan terjadi pemerataan dalam hak akses jasa layanan perpustakaan kepada seluruh masyarakat tanpa adanya batasan kondisi geografis sehingga terwujud layanan perpustakaan yang inklusif.



Gambar 3. Kerjasama dengan polairud polda kalteng membangun pondok baca

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pulang Pisau juga intens melakukan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional sebagai lembaga pembina seluruh perpustakaan di Indonesia. Di tahun 2019, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pulang Pisau memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang perpustakaan yang di keluarkan oleh Perpustakaan Nasional untuk melakukan renovasi gedung dan pengadaan koleksi perpustakaan. Renovasi gedung layanan perpustakaan dimaksudkan untuk menambah kenyamanan masyarakat ketika berkunjung dan memanfaatkan sumberdaya informasi yang ada di perpustakaan umum Kabupaten Pulang Pisau. Pengadaan koleksi perpustakaan juga menjadi fokus perbaikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pulang Pisau untuk menambah keragaman koleksi guna memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan.

### Kesimpulan

Menghadapi tantangan pembangunan, perpustakaan harus melakukan pembenahan dan transformasi agar eksistensi kelembagaannya tidak dipandang sebelah mata. Perpustakaan memiliki peran strategis dalam pembangunan dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan menstimulan peningkatan ekonomi masyarakat melalui

sumberdaya informasi yang ada di perpustakaan. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan jawaban dari tantangan transformasi tersebut. Perlahan, paradigma perpustakaan mengalami perubahan dari sekadar tempat menyimpan informasi menjadi wadah masyarakat merujuk informasi dan berkumpul untuk saling bertukar informasi. Perpustakaan menjadi lembaga strategis yang berperan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu mewujudkan hal tersebut, perpustakaan harus berbenah.

Pertama, perpustakaan harus dapat menyediakan ruang untuk masyarakat datang dan saling berinteraksi hingga bertukar informasi untuk pengembangan kompetensi diri masing-masing. Kegiatan ini dinamakan dengan makerspace di perpustakaan dan kegiatan ini menjadi salah satu bentuk transformasi yang harus dilakukan oleh perpustakaan untuk menuju perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Kedua, Perpustakaan bukan lagi menunggu pemustaka untuk datang dan memanfaatkan informasi yang ada di perpustakaan namun juga harus melakukan ekstensifikasi jasa layanannya dengan menggunakan mobil perpustakaan keliling atau memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan hadir dalam format perpustakaan digital.

Ketiga, perpustakaan harus menjalin kerjasama dengan stakeholder lain untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya yang ada dalam mewujudkan pemerataan hak akses layanan perpustakaan kepada masyarakat. Stakeholder yang dimaksud dalam hal ini mencakup lembaga maupun perorangan.

## Daftar Pustaka

- Fourie, Ina (2007). Public Libraries Adressing Social Inclusion : How we may think .... . Disampaikan pada world library and information congress : 73 RD IFLA General Conference and Council. Tersedia di : <http://e-resources.perpusnas.go.id:2308/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=57e32ff9-9f0a-4a44-ba3f-7edd0a75d62b%40sessionmgr4008>  
Dan <https://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/128-Fourie-en.pdf> diakses pada tanggal 3 Desember 2019 pada pukul 20.28 WIB
- Houston, Chynthia R (2013). "Ma (placeholder1) makerspace @ your school library : Consider the Possibilities". IASL Conference p.360.
- IFLA.(2008). Multicultural library manifesto. IFLA Section on Library Services to Multicultural Populations. Tersedia di : <http://archive.ifla.org/VII/s32/pub/MulticulturalLibraryManifesto.pdf>  
Diakses pada tanggal 11 November 2019 pada pukul 20.30 WIB
- Pisarski, Alyssa (2014). "Finding a place for tween : Makerspace and Libraries", dimuat dalam Jurnal Fall : Children and Libraries.
- Rawal, Nabin (2008). "Social Inclusion and Exclusion: A Review", dalam Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology Volume 2, hal. 161-180  
Tersedia di: [https://www.academia.edu/7838559/Social\\_Inclusion\\_and\\_Exclusion\\_A\\_Review\\_1](https://www.academia.edu/7838559/Social_Inclusion_and_Exclusion_A_Review_1)  
Diakses pada tanggal 4 November 2019 pada pukul 20.00 WIB
- Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Tersedia di <https://jdih.perpusnas.go.id/detail/49>  
diakses pada tanggal 13 November 2019 pada pukul 18.00 WIB
- Wijayanti, Luki (2019). Peningkatan Kompetensi SDM Perpustakaan Khusus Dalam Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Disampaikan pada diskusi panel perpustakaan khusus, Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan Tahun 2019, Tanggal 15 Maret 2019 : Jakarta.  
<https://economy.okezone.com/read/2018/07/18/320/1923967/bappenas-matangkan-konsep-pembangunan-ekonomi-inklusif-apa-itu> diakses pada tanggal 13 januari 2020 pada pukul 20.00 WIB

